



PUTUSAN

Nomor: 32/Pdt.G.S/2020/PN Smd

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumedang, yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : **O N I H**
Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang/ 09 April 1955
Tempat Tinggal Dahulu : Dusun Sadang, RT.002, RW.005 Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
Tempat tinggal sekarang : Dusun Karanganyar Rt.002, RW. 003 Desa Karangpakuan, Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Melawan

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang, provinsi Jawa Barat, Desa Cijeungjing, Jatigede, Kab. Sumedang, Jawa Barat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, Tergugat datang menghadap seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Bapak Nindyo Purnomo, S.H. berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa tertanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatannya karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Tergugat menolak untuk memproses dan memberikan No. ID serta menolak untuk membayar hak Penggugat yaitu Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri di atas tanah seluas 284,3 m² milik Penggugat yang terletak di Dusun babakan, Letter C No.1403, Persil No.222, Kelas D.II Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 370, Peta Bidang No. 2983 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan Fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata Bukti P-1, P-2, P-4 dan P-8 sesuai dengan aslinya, untuk Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-7 berupa fotokopi dari fotokopi, dan untuk Bukti P-3 tidak ada pembandingnya;
- Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Aden Tarsiman dan saksi Ateng Wayudi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;
- Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1, T-2, dan T-3 yang keseluruhannya merupakan fotokopi dari fotokopi;
- Bahwa, uraian bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut secara lengkap telah termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan;
- Bahwa, setelah membaca dan mencermati bukti surat bertanda P-5/T-1 yaitu Model C, Daftar Uraian Jenis dan Fungsi Bangunan dan Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan, bukti P-6/T-2 yaitu Model B Data Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengairan Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Cimanuk yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pembebasan Tanah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor: 32/Pdt.G.S/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Waduk Jatigede, dan bukti P-7 yaitu gambar lembar peta Nomor Peta: 370, Bidang: 2983, tanah seluas 284,3 m² Persil Nomor 222, Letter C Nomor 1403, Kelas D.II, atas nama Omih Binti Udi, terletak di Dusun Babakan, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, di atas tanah tercatat atas nama Omih Binti Udi, terdapat 2 (dua) unit bangunan rumah tinggal panggung darurat masing-masing milik Udi (ayah Penggugat) dan Onih/Adinta yang pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi masing-masing sebesar Rp. 461.390,00 dan Rp. 312.000,00 tercatat dalam Bukti-bukti tersebut nama pemilik kedua bangunan adalah Adinta Bin Kisal;

- Bahwa, saksi Aden Tarsiman dan saksi Ateng Wahyudi di persidangan di bawah sumpah telah menerangkan bahwa benar Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum Udi, sedangkan Adinta Bin Kisal adalah suaminya (Bukti P-2, P-3, dan P-4);
- Bahwa para saksi menerangkan apabila Omih Binti Udi sebagaimana dalam dokumen Bukti P-5, P-6, dan P-7 adalah Onih yang sekarang sebagai Penggugat sehingga nama Omih Binti Udi dan Onih Binti Udi adalah sama;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan bahwa benar Penggugat memiliki bangunan rumah panggung darurat ukuran 8 m x 3,9 m = 31,20 m² yang dibangun di atas tanah milik miliknya yang terletak di Persil Nomor 222, Letter C Nomor 1403, Kelas D.II, atas nama Omih Binti Udi, terletak di Dusun Babakan, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, bersebelahan dengan bangunan rumah tinggal panggung darurat milik Udi, (Ayah Penggugat) yang lebih dulu berdiri, kedua rumah tersebut tercatat atas nama Adinta Bin Kisal;
- Bahwa yang mengajukan gugatan adalah Penggugat dan bukan Adinta Bin Kisal dikarenakan pemilik sebenarnya adalah Penggugat, sebagaimana tercatat bahwa tanah tempat bangunan rumah tersebut berdiri adalah milik Onih Binti Udi. Dipakai nama Adinta Bin Kisal untuk memudahkan administrasi saja karena Adinta Bin Kisal adalah suami Penggugat;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan pada tahun 1984 baik rumah milik ayah Penggugat maupun rumah milik Penggugat, terdata yang akan dibebaskan oleh Tergugat untuk pembangunan waduk Jatigede Sumedang dan akan diberi ganti rugi, oleh karena pada saat pendataan Penggugat yang bersuamikan Adinta, maka untuk memudahkan pendataan dan pengadministrasian proses ganti ruginya agar tidak terhambat, maka semua bangunan rumah diatasnamakan Adinta/suami Penggugat. Terdata dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dalam Lembar Peta Nomor: 370, Bidang: 2983, tanah seluas 284,3 M² Persil Nomor 222, Letter C Nomor 1403, Kelas D.II, atas nama Adinta Bin Kisal, terletak di Dusun Babakan, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, di atas tanah milik Onih Binti Udi, terdapat 2 (dua) unit bangunan rumah tinggal panggung darurat masing-masing milik Udi (ayah Penggugat) dan Onih-Adinta yang pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi masing-masing sebesar Rp. 461.390,00 dan Rp. 312.000,00;

- Bahwa selanjutnya saksi-saksi juga menerangkan pada sekira tahun 2012 dan 2014 dilakukan pendataan oleh Tergugat, untuk menentukan terhadap Penduduk yang berhak menerima Uang tunai untuk pengganti rumah tinggal dan Uang Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang kemudian pada tahun 2015 Tergugat menetapkan daftar nama dan menerbitkan ID bagi penduduk yang berhak menerima uang tunai untuk pengganti rumah tinggal dan uang santunan penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk Jatigede, diantaranya yang ditetapkan adalah Udi (Ayah Penggugat) ditetapkan dan mendapatkan Nomor ID, bukan nama Adinta Bin Kisal (suami Penggugat) dan telah menerima uang tunai untuk pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas bangunan rumah tinggalnya, sedangkan atas rumah tinggal milik Penggugat yang diatasnamakan Adinta Bin Kisal (suami Penggugat) dengan pemilik sebenarnya Penggugat justru tidak ditetapkan terdaftar dan tidak ditetapkan sebagai penerima uang tunai untuk pengganti rumah tinggal yang kemudian mengajukan komplain kepada Tergugat pada tanggal 7 Juli 2015 (Bukti P-8) namun tetap saja tidak diproses ditindaklanjuti sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran adanya dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegaskan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat memiliki bangunan rumah tinggal panggung darurat ukuran 8 m x 3,9 m = 31,20 m² yang dibangun di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Persil No.222, Letter C No.1403, Kelas D.II, dusun Babakan, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, atas nama Omih Binti Udi, terdata pada proyek pembangunan Waduk Jati Gede dalam Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta Nomor: 370, Bidang: 2983, tanah seluas 284,3 m² yang pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 312.000,00 yang diatasnamakan Adinta Bin Kisal (Suami Penggugat)?
2. Apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut kemudian Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)?
3. Apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan ganti rugi atas bangunan rumah tinggal panggung darurat milik Penggugat dan tidak memberikan ID mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada Tahun 2015, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti surat bertanda P-5/T-1, P-6/T-2, dan P-7/T-3 serta keterangan saksi Aden Tarsiman dan saksi Ateng Wahyudi di persidangan keduanya dibawah sumpah, Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalilnya bahwa Penggugat memiliki bangunan rumah tinggal panggung darurat ukuran 8 m x 3,9 m = 31,20 m² yang dibangun di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Persil Nomor 222, Letter C Nomor 1403, Kelas D.II, atas nama Omih Binti Udi, dusun Babakan, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, yang terdata pada proyek pembangunan Waduk Jati Gede dalam Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta Nomor: 370, Bidang: 2983, tanah seluas 284,3 m² yang pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 312.000 yang diatasnamakan Adinta Bin Kisal (Suami Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian pokok permasalahan angka 1 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan angka 2 yaitu apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut yang kemudian Penggugat menjadi berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah)?;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, menentukan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d angka 4 bahwa salah satu Desa yang termasuk dalam area waduk Jatigede pada Kabupaten Sumedang adalah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area waduk sebagaimana pada ayat (1) perlu segera dilakukan penanganan dampak sosial;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut diatur bahwa Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah: penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, selanjutnya dalam Pasal 3 diatur kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa pengganti rumah dalam bentuk uang tunai yang diperuntukkan sebagai:

- a. penggantian bangunan;
- b. penggantian pengadaan tanah; dan
- c. tunjangan kehilangan pendapatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, maka besaran nilai uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal dan pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada permasalahan angka 1 bahwa terhadap bangunan rumah tinggal Penggugat tersebut pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi oleh Pemerintah melalui Tergugat, maka apabila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana telah diuraikan di atas maka adalah adil menurut hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian pokok permasalahan angka 2 telah terjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa Tanda Terima Berkas Komplain atas nama Onih (Penggugat), telah membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan komplain pada tanggal 7 Juli 2015 atas bangunan yang belum menerima uang pengganti rumah akan tetapi komplain tersebut belum ditanggapi oleh Pemerintah sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok permasalahan angka 3 yaitu apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal permanen milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang pengganti rumah tinggal dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badruzalam, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah (Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146-147):

1. Harus ada perbuatan,
2. Perbuatan itu harus melawan hukum,
3. Ada kerugian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian,

5. Ada kesalahan (*schuld*);

Selanjutnya, menurut Rosa Agustina (Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, PS-FHUI, 2003, hal.38-46), Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah:

- Melanggar hak subyektif orang lain,
- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- Bertentangan dengan kaidah kesusilaan,
- Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini adalah Tergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dari Penggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badruzalam;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran uang tunai pengganti rumah tinggal kepada Penggugat, tentu saja telah melanggar hak subyektif dari Penggugat berupa hak atas harta kekayaan dan harta kebendaan Penggugat, telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemberian uang tunai pengganti rumah kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede dan Perbuatan Tergugat tersebut juga dipandang telah bertentangan dengan kaidah kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dapatlah diartikan sebagai Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum sebagaimana teori hukum menurut Rosa Agustina. Dengan demikian pokok permasalahan angka 3 telah terjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” (R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hal. 323) maka Tergugat haruslah mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka terhadap dalil sangkalan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 1 dan 2 maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dan menyatakan Penggugat sebagai orang yang berhak menerima uang tunai untuk pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri di atas tanah seluas 284,3 m² milik Penggugat yang terletak di Persil No.222, Letter C No.1403, Kelas D.II, Dusun babakan, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 370, Peta Bidang No. 2983 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 3 maka Petitum angka 3 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak menerima uang pengganti untuk rumah tinggal, maka Tergugat sebagai pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembayaran uang tunai untuk pengganti rumah tinggal tersebut, diperintahkan untuk menyerahkan uang tunai pengganti rumah tinggal/uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat, sebagaimana Peta Nomor: 370, Nomor Bidang: 2983, maka dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5, karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap telah dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, pasal pasal dalam *Het Indonesisch Reglement (HIR)* dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai orang yang berhak menerima uang tunai untuk pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri di atas tanah seluas 284,3 m² milik Penggugat yang terletak di Persil No.222, Letter C No.1403, Kelas D.II, Dusun babakan,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor: 32/Pdt.G.S/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 370, Peta Bidang No. 2983 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat segera menyerahkan Uang tunai untuk pengganti rumah tinggal Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS**, tanggal **7 JANUARI 2021** oleh **HAPPY TRY SULISTIYONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AHMAD SYAFEI**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat/kuasanya;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AHMAD SYAFEI

HAPPY TRY SULISTIYONO, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	20.000,00
6. Meterai	:	Rp.	9.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	364.000,00

(tiga ratus enam puluh empat ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor: 32/Pdt.G.S/2020/PN Smd